



Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Muhammad Rafly Febryansyah¹, Juliana Putri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email : rafliandro01@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 02, 2025

Revised October 17, 2025

Accepted October 26, 2025

Keywords:

Fiscal Policy, Income

Inequality, Economic Growth,

Gini Index

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of fiscal policy components — education spending, local taxes, and social assistance—on income inequality and economic growth in Indonesia. Income inequality is measured by the Gini Index, while economic growth is measured through Gross Domestic Product (GDP). A quantitative approach using secondary annual data from 2010 to 2023 is employed. Multiple linear regression and classical assumption tests are used for data analysis. The results show that education spending and social assistance have a negative effect on income inequality, while local taxes have a positive effect. Income inequality significantly and negatively affects economic growth. Therefore, targeted and equitable fiscal policies are necessary to support inclusive economic growth.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received October 02, 2025

Revised October 17, 2025

Accepted October 26, 2025

Kata Kunci :

Kebijakan Fiskal, Ketimpangan

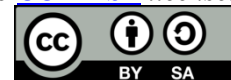
Pendapatan, Pertumbuhan

Ekonomi, Indeks Gini

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal yang terdiri dari belanja pendidikan, pajak daerah, dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Indeks Gini, sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder tahunan dari tahun 2010–2023. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pajak daerah memiliki pengaruh positif. Ketimpangan pendapatan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemerataan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Rafly Febryansyah

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

E-mail: rafliandro01@gmail.com



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi nasional. Namun, dalam realitasnya, pertumbuhan ekonomi seringkali dibayangi oleh ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara (Todaro & Smith, 2020).

Kebijakan fiskal, yang meliputi pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi agregat, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh distribusi dan sasaran belanja yang tepat (Musgrave & Musgrave, 2019).

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketimpangan menimbulkan masalah efisiensi ekonomi, mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif, dan berpotensi menimbulkan instabilitas sosial (Stiglitz, 2015). Ketika sebagian besar sumber daya terkonsentrasi pada kelompok pendapatan tinggi, konsumsi dan produktivitas masyarakat berpendapatan rendah menjadi terbatas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Indonesia, sebagai negara berkembang, masih menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dalam dua dekade terakhir, Indeks Gini Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan tetap berada pada level yang mengkhawatirkan (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya instrumen kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran pemerintah terdapat variabel belanja pegawai, belanja barang, dan subsidi. Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar (Munawar, 2013). Namun diyakini bahwa kebijakan subsid masih merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga pengeluaran negara tetap stabil pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek subsidi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ngaisah dan Indrawati, 2021). Oleh karena itu kebijakan subsidi harus tepat sasaran agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang (Yuliani et al., 2024).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan, dikarenakan setelah melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya ternyata pengaruh kebijakan fiskal masih belum konsisten, dampaknya bisa berpengaruh positif atau negative, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. Adapun variable kebijakan fiskal yang digunakan pada variable ini yaitu belanja Pendidikan, pajak daerah, dan bantuan social. Menurut penelitian Apriyesa dan Miyasto (2013) pajak daerah mampu mengurangi Tingkat ketimpangan pendapatan. Modal social seperti Pendidikan dan Kesehatan juga digunakan sebagai pendukung tingkat pendapatan



yang diterima, karena rendahnya modal social bisa saja menjadi pemicu timbulnya masalah kesenjangan pendapatan akibat produktifitas yang rendah. Pengeluaran pemerintah berupa bantuan social juga diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menggerakkan aktifitas ekonomi serta mencegah terjadinya resiko social, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2019 (Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap ketimpangan Pemda, n.d).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi seperti:

- Badan Pusat Statistik (BPS),
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk),
- Laporan APBN,
- dan jurnal-jurnal ilmiah terkait.

Data yang digunakan berupa data tahunan (time series) selama kurun waktu tertentu (misalnya 2010–2023), yang disesuaikan dengan ketersediaan data dari masing-masing sumber.

2. Variabel Penelitian

- Variabel independen (X):
 1. Belanja Pendidikan (X_1)
 2. Pajak Daerah (X_2)
 3. Bantuan Sosial (X_3)
- Variabel intervening (Z):
 - 1) Ketimpangan Pendapatan (diukur dengan Indeks Gini)
- Variabel dependen (Y):
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi (diukur melalui PDB/Produk Domestik Bruto)

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh langsung dari kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Model analisis yang digunakan adalah:

1. Model 1 :



Ketimpangan Pendapatan = $\alpha + \beta_1(\text{Belanja Pendidikan}) + \beta_2(\text{Pajak Daerah}) + \beta_3(\text{Bantuan Sosial}) + \varepsilon$

2. Model 2 :

Pertumbuhan Ekonomi = $\alpha + \beta_1(\text{Ketimpangan Pendapatan}) + \varepsilon$ Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS, STATA, atau EViews.

4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, meliputi:

- Uji Normalitas
- Uji Multikolinearitas
- Uji Heteroskedastisitas
- Uji Autokorelasi

5. Uji Statistik

Untuk menguji signifikansi model dan variabel dilakukan:

- Uji t: untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- Uji F: untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- Koefisien Determinasi (R^2): untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui pengaturan pengeluaran negara dan penerimaan negara, terutama melalui sistem perpajakan. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong konsumsi, investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi atau defisit anggaran yang besar. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan fiskal melibatkan langkah-langkah seperti pengeluaran pemerintah, pemberian insentif pajak, dan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan efek positif di berbagai sektor penting dalam perekonomian. Dalam menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan beberapa instrumen yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara. Salah satu instrumen utama adalah pengeluaran untuk belanja publik, yang mencakup pengalokasian dana untuk berbagai sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program bantuan sosial. Pengeluaran ini berfungsi untuk merangsang permintaan domestik, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang lebih merata. Selain pengeluaran publik, pemerintah juga memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak bagi perusahaan atau individu, guna mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Insentif pajak ini bertujuan untuk



merangsang kegiatan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konsumsi domestik.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi untuk sektor-sektor yang membutuhkan dukungan lebih. Stimulus ini bisa berupa bantuan langsung tunai, subsidi, atau program bantuan lainnya yang ditujukan untuk mendukung sektor-sektor tertentu seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup sektorsektor tersebut dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada usaha lokal. Pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada, dengan tujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara lebih adil dan efisien. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan padasektor-sektor tertentu.

serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, yang mampu mendukung perekonomian secara keseluruhan. 1 Dalam sistem ekonomi , kebijakan fiskal diterapkan melalui dua instrumen utama: pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pemerintah menggunakan pengeluaran publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, perpajakan menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas makro ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Dalam system ini, pajak dikenakan secara luas pada semua warga negara tanpa memperhatikan status keagamaan atau moralitas. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan diharapkan dapat mencapai redistribusi pendapatan melalui sistem pajak progresi (Sari et al., 2024).

Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal. Ketimpangan pendapatan muncul pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, distribusi pendapatan akan memburuk, tetapi tahap selanjutnya akan meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Simon Kuznets berpendapat bahwa distribusi pendapatan cenderung menjadi lebih buruk, atau tidak merata pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, tetapi membaik pada tahap selanjutnya. Pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses penurunan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, pada saat terjadinya pembangunan yang lebih meningkat garis ketimpangan berbalik menuju tingkat ekuitas yang lebih tinggi dalam pembagian pendapatan (Nugrahi et al., n.d.).



Dalam teori Kuznet bahwa ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu, distribusi pendapatan akan memburuk, namun, kemudian distribusi pendapatan akan meningkat dan ketidaksetaraan akan menurun, sehingga menciptakan masyarakat yang semakin adil. Singkatnya, analisis Kuznets ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan baru akan berkurang ketika kemakmuran tercapai. Dan berdasarkan analisis itu, ia juga menciptakan kurva "U Reverse" atau "U-terbalik". Hipotesis U terbalik tentang ketimpangan, hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk/tidak merata, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik/semakin merata. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang kesempatan dan peluang pembangunan yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik, sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Penyebab kurva Environmental Kuznet antara lain:

- 1) Bukti empiris penurunan tingkat polusi dengan pertumbuhan ekonomi
- 2) Pendapatan cadangan dengan pertumbuhan
- 3) Fokus pada standar hidup sebagai lawan dari PDB
- 4) Teknologi yang ditingkatkan dan energy terbarukan
- 5) De-industrialisasi
- 6) Peran peraturan pemerintah
- 7) Utilitas marginal pendapatan yang semakin berkurang

Simon Kuznet telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita. Hal ini diwakili oleh kurva U terbalik. Kuznet menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat pada awal proses pembangunan melalui adanya urbanisasi dan industrialisasi, tetapi kemudian menurun pada akhir tingkat pembangunan atau proses pembangunan yang lebih tinggi, yaitu ketika sektor industri di perkotaan mampu untuk menyerap para tenaga kerja yang terdapat di pedesaan atau sektor pertanian. Dengan adanya migrasi yang dilakukan penduduk desa ke kota maka akan membuat populasi pedesaan berkurang atau menurun dan akan mengakibatkan meningkatnya kesenjangan pendapatan antara desa dan kota dengan meningkatnya populasi perkotaan, namun berdasarkan teori Kuznet kesenjangan tersebut akan menurun seiring dengan tercapainya industrialisasi. Pertumbuhan awal seperti dijelaskan dalam model Lewis, dimana pertumbuhan yang terjadi di awal pembangunan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun pada suatu titik tertentu pertumbuhan yang terjadi akan mengurangi tingkat rasio (Yuliani et al., 2024b).

Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

1. Koefisien Gini (Gini Rasio). Rasio Indeks Gini adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu daerah. Indeks gini dikembangkan oleh seseorang ilmuwan



Italia bernama Corrado Gini. Karya ini dipublikasikan tahun 1912 dengan judul “Variabilita e mutabilita”. Menurut Todaro dan Smith, koefisiengini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan daerah secara keseluruhan. Koefisien gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Penghitungan indeks gini dapat dihitung melalui cara berikut:

$$GR = 1 - \sum fi (Yi + Yi-1)$$

Dimana:

Fi : Total kumulatif pemeroleh pendapatan dalam golongan ke-i

Yi : Total kumulatif pemeroleh pendapatan dalam golongan ke-i

Indeks gini merupakan suatu pengukuran ketimpangan yang paling banyak digunakan. Nilai indeks gini beraa diantara angka 0 sampai 1. Apabila indeks gini semakin mendekati 0 maka berarti masyarakat didaerah tersebut memiliki pendapatan dengan jumlah yang smaa atau rata. Namun jika indeks gini yang menunjukkan nilai semakin mendekati 1 maka menunjukkan adanya ketimpangan disuatu wilayah tersebut, yang berarti tidak merata dan hanya satu orang atau golongan kelompok masyarakat saja yang menerima pendapatan tersebut.

2. Kurva Lorenz. Kurva lornez adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar golongangolongan penduduk dengan bagian dari pendapatan yang diterimanya. Kurva Lorenz digunakan untuk menganalisis data pendapatan individu disuatu wilayah. Kurva Lorenz juga dapat dijadikan patokan untuk menentukan sebuah distribusi pendapatan sudah merata atau terjadi ketimpangan. Unsur dari kurva Lorenz adlah sumbu horizontal/mendatar yang menejlaskan presentase penduduk secara komulatif. Sedangkan sumbu vertical/ tegak merupakan presentase pendapatan yang diterima oelh penduduk. Lengkungan daerah A menunjukkan pemerataan pendapatan. Semakin luas daerah arsiran A pendapatan penduduk semakin tidak merata dan sebaliknya (Ramadhan et al., n.d.).

Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan

Hasil analisis regresi menunjukkan variable independent yang meliputi belanja pendidikan, belanja social dan pajak daerah dapat memberikan penjelasan terhadap variable dependen yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 88,35 %. Persentase tersebut diperoleh dari nilai R squared sebesar 0.883561. Berikut table hasil analisis regresinya.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi

Variabel	Coefficient	Prob
C	43.67940	0.0000
BelPend	5.09E-06	0.7807
BelBansos	-0.000176	0.0378
PajDaer	-2.15E-05	0.0419
Prob-F (Statistic)		0.000431
R-squared		0.883561
Adjust R-squared		0.839897

Sumber:data diolah melalui E-Views, 2024



Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel belanja pendidikan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan sedangkan variabel belanja bantuan sosial dan variabel pajak daerah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel gini ratio (Y). berdasarkan persamaan sebelumnya maka didapat: $Y = 43.67940 + 5.09E-06X_1 - 0.000176X_2 - 2.15E-05X_3 + e$ Melalui hasil regresi dan persamaan tersebut diatas dapat diartikan bahwa belanja Pendidikan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zufri (2013) yang menjelaskan bahwa belanja Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM), penelitian Haryadi (2011) juga menjelaskan bahwa belanja Pendidikan di kab/kota dengan variabel input belanja pendidikan serta variabel output berupa APM, rasio guru-murid, rasio kelas –murid, angka putus sekolah, dan angka melanjutkan.⁷ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan belanja Pendidikan tidak menjamin terjadinya peningkatan pada sektor Pendidikan karena Sebagian daerah masih mengalami inefisiensi. Akibatnya, Ketika sektor Pendidikan tidak berkembang maka kualitas Sumber daya manusia nya pun tidak mengalami peningkatan, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Variabel belanja bantuan social berpengaruh negative dan signifikan terhadap koefisien gini, berdasarkan persamaan diatas dapat kita simpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan pada belanja bantuan social sebesar 1 persen (*ceteris paribus*) maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan menurun sebesar 0.000176. Hal ini sesuai dengan peran distribusi pemerintah dimana pemerintah berperan sebagai pihak yang melakukan distribusi atau pemerataan pendapatan atau kekayaan kepada Masyarakat. Kegiatan pemerintah dalam menyalurkan belanja modal dan bantuan sosial, salah satunya merupakan bentuk pemerintah dalam menerapkan fungsi alokasi dan distribusi. Variable pajak daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap koefisien gini, berdasarkan persamaan diatas dapat kita simpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 1% (*ceteris paribus*) maka angka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,0000215. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyasa dan Miyasto (2013) bahwa pajak daerah mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komponen kebijakan fiskal berupa belanja bantuan sosial dan pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan alokasi pada kedua sektor tersebut dapat menurunkan tingkat ketimpangan secara efektif, sementara belanja pendidikan belum menunjukkan pengaruh signifikan; di sisi lain, ketimpangan pendapatan terbukti berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan strategi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan dalam distribusi anggaran guna mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkeadilan sosial di Indonesia.



DAFTAR RUJUKAN

Dampak_Kebijakan_Fiskal_Terhadap_Ketimpangan_Penda. (n.d.).

Nugrahad, W., Rinaldi, M., Darayani, F., Iqbal, M., Tri, R., Panggabean, T., Samora Muliana, R., & Nugrahad, E. W. (n.d.). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia.

Ramadhan, M., Aji, B., Wijayanti, D., Bisnis, F., & Ekonomika, D. (n.d.). Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. In Journal of Economics, Assets, and Evaluation (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>

Yuliani, N. M., Ridwan Paturochman, I., Mubarak, A. T., Muzaki, R. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Siliwangi, U. (2024a). KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN

DI INDONESIA. 18(1). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1> Contoh penulisan daftar Pustaka